

DESAIN KURIKULUM YANG RELEVAN UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER

Anik Ghufron

FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (email: anikghufron@uny.ac.id)

Abstract

One of the Indonesian's problems today is the implementation of character education not optimal yet. At present, education is oriented to the development of cognitive aspect at low level. Parameter of students' achievement learning is academic domain. Instructional activity trends as a transfer of knowledge than as a process of transmission of moral values.

We sure that implementation of character education is a complex process, especially that relate with conten organization. What is character education content is separate subject curriculum or integrated curriculum? To solve this problem, we must develop curriculum design that relevan to character education

Keywords: curriculum design, character education.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi alternatif bagi upaya pemecahan masalah dekadensi moral bangsa. Banyak pihak yakin bahwa pendidikan karakter dapat mengatasi persoalan moral bangsa dan bahkan dapat meningkatkan atau memberi nilai tambah bagi capaian prestasi akademik peserta didik. Jacques S. Benninga, et. al (Forrest W Parkay, Eric J. Anctil, and Glen Hass, 2010), menyatakan; *"in our sample, elementary schools with solid character education programs showed positive relationship between the extent of character education implementation and academic achievement not only in a single year but also across the next two years"*.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di negara kita? Pendidikan karakter belum diimplementasikan secara memadai. Pendidikan karakter masih terkesan diwacanakan. Walaupun demikian, kita patut bersyukur karena pada saat ini pihak Kemdiknas telah menetapkan pendidikan karakter sebagai program nasional (Kompas, 2 Mei 2011) Kemdiknas juga sedang menyusun rumusan dan strategi implementasi pendidikan karakter sehingga

pendidikan karakter benar-benar membumi di dalam sistem pendidikan nasional, baik melalui pembiasaan maupun intervensi.

Apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan program nasional Kemdiknas di bidang pendidikan karakter tersebut? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengembangkan desain kurikulum yang relevan bagi implementasi pendidikan karakter. Cara ini dipandang relevan digunakan karena efektivitas implementasi kurikulum selalu berkaitan dengan desain kurikulumnya. Ornsteins A.C dan Hunkins F.P (2004) menyatakan “*.., design refers to the arrangement of the elements of a curriculum into a substantive entity*”. Dengan cara demikian, pihak sekolah perlu terlebih dahulu memikirkan desain kurikulum mana yang dipandang relevan untuk implementasi pendidikan karakter di sekolah.

Tulisan ini memuat tiga hal esensial. *Pertama*, makna pendidikan karakter. *Kedua*, pendekatan budaya untuk pengembangan pendidikan. *Ketiga*, desain kurikulum berbasis budaya. *Keempat*, pola pengembangan kurikulum berbasis budaya.

Pendidikan Karakter

Sebelum membahas tentang pendidikan karakter, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang makna karakter. Bertitik tolak dari pengertian karakter yang kita sepakati, kemudian kita dapat mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut tentang hakiki dan ruang kajian pendidikan karakter.

Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter berarti tabiat atau kepribadian. Hill (Wanda Chrisiana, 2005) mengatakan “*character determines someone’s private thoughts and someone’s action done. Good character is the inward motivation to do what is right, according to the highest standard of behavior in every situation*”. Dalam konteks ini, karakter dapat diartikan sebagai identitas diri seseorang.

Menurut Endang Ekowarni (2010) pada tatanan mikro, karakter diartikan; (a) kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu; atau (b) watak, akhlak, ciri psikologis. Ciri-ciri psikologis yang dimiliki individu pada lingkup pribadi, secara evolutif akan berkembang menjadi ciri kelompok dan lebih luas lagi menjadi ciri sosial. Ciri psikologis individu akan memberi warna dan corak identitas kelompok dan pada tatanan makro

akan menjadi ciri psikologis atau karakter suatu bangsa. Pembentukan karakter suatu bangsa berproses secara dinamis sebagai suatu fenomena sosio-ekologis.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa karakter merupakan jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang. Karakter selalu berkaitan dengan dimensi fisik dan psikis individu. Karakter bersifat kontekstual dan kultural.

Karakter merupakan jati diri seseorang yang merupakan kumulasi dari karakter-karakter pada setiap diri manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Endang Ekowarni (2010) bahwa karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia (*when character is lost then everyting is lost*). Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happinnes*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan persatuan (*unity*).

Dengan batasan yang demikian, para pengambil kebijakan atau pihak-pihak penyelenggara pendidikan perlu memperhatikan dan mengetahui makna karakter dan karakter setiap individu. Hal ini perlu dilakukan karena kesalahan atau perbedaan makna tentang karakter seseorang berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang memuat nilai-nilai luhur suatu bangsa.

Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam karakter seseorang ? Berdasarkan makna karakter yang dipaparkan di atas, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang berkembang , berlaku, diakui, diyakini, dan disepakati untuk dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat atau negara. Nilai-nilai tersebut, menurut Endang Ekowarni (2010) tak lain adalah nilai-nilai luhur (*supreme values*) yang merupakan pedoman hidup (*guiding principles*) yang digunakan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, kedamaian dan kebahagiaan.

Kemanusiaan yang dimaksud adalah *umanitarianisma* (perikemanusiaan) yang meliputi; solidaritas sesama manusia, menghormati hakekat dan martabat manusia, kesetaraan dan tolong menolong antar manusia, menghormati perbedaan dalam berbagai dimensi antar manusia, menciptakan kedamaian. Budi pekerti sebagai nilai luhur adalah pilihan perilaku yang dibangun berdasarkan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga sering diposisikan sebagai nilai instrumental

atau cara mencapai sesuatu atau sikap terhadap sesuatu. Dengan budi pekerti, kita akan berbakti, mengabdikan dengan sepenuh jiwa raga kepadabangsa dan kita bukan bangsa pencaci ataupun penghujat.

Endang Ekowati (2010) juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang bersifat multi etnis memiliki khasanah ajaran, wewarah, tuntunan yang sangat kaya mengenai budi pekerti. Bagi masyarakat Jawa, wewarah budi pekerti banyak diwarnai dari para pujangga seperti Ki Ageng Soerjomentaram dengan ajaran bahwa dalam menjalani hidup sebaiknya menghindari perilaku : *ngangsa-angsa; ngaya-aya; golek benere dhewe*. Raden Mas Sosrokartono (saudaranya Raden Ajeng Kartini) adalah sarjana sastra pertama dari Negeri Belanda mengajarkan sikap batin utama untuk menghadapi berbagai situasi konflik. Ajaran beliau adalah *sugih tanpo bandha; digdaya tanpo aji; nglurug tanpo bala; menangtanpo ngasorake*.

Menurut Persyarikatan Muhammadiyah (Hadisaputra, 2010) di antara nilai-nilai keutamaan atau karakter yang perlu dimiliki bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut. *Pertama*, nilai-nilai spiritualitas. *Kedua*, nilai-nilai solidaritas. *Ketiga*, nilai-nilai kedisiplinan. *Keempat*, nilai-nilai kemandirian. *Kelima*, nilai-nilai kemajuan dan keunggulan.

Dalam konteks implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP, sesungguhnya, nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan menjadi isi atau muatan kurikulum, untuk memperkaya kajian materi pembelajaran pokok. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip implementasi KTSP, yaitu proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif peserta didik, berhubungan dengan tipe pengetahuan yang harus dipelajari, dan harus melibatkan peran lingkungan sosial (Wina Sanjaya, 2005: 81-82).

Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter diartikan secara beragam oleh para ahli. Misalnya, T. Lickona (1991) menyatakan; *“in character education, it’s clear we want our children are able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right-even in the face of pressure from without and temptation from within”*. Parkey, F.W, Hass, G.L. dan Anctill E.J (2011) menyatakan; *“character education can be defined in terms of relationship virtues (e.g.,*

respect, fairness, civility, tolerance), self-oriented virtues (e.g., fortitude, self-discipline, effort, perseverance) or combination of the two”.

Di dalam Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termuat pernyataan; “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pernyataan tersebut semakin menguatkan pandangan bahwa di dalam proses pendidikan ada proses pembentukan karakter hasil pendidikan berupa lulusan yang berkarakter.

Dari tiga contoh pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter merupakan model pendidikan pembentukan watak dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Watak dan kepribadian yang diharapkan dimiliki peserta didik, antara lain; kejujuran, kedisiplinan, ketertiban, kemerdekaan, kemandirian, toleransi, ketaatan, dan keadilan.

Pendidikan karakter tak sama dengan pendidikan moral. Pendidikan karakter memiliki tingkatan lebih tinggi dan lebih kompleks daripada pendidikan moral. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan benar atau salah, tetapi berusaha menanamkan kebiasaan perbuatan baik, yang dapat menyebabkan peserta didik memahami mana yang baik dan mana salah, mampu menghayati nilai-nilai dapat mengamalkannya.

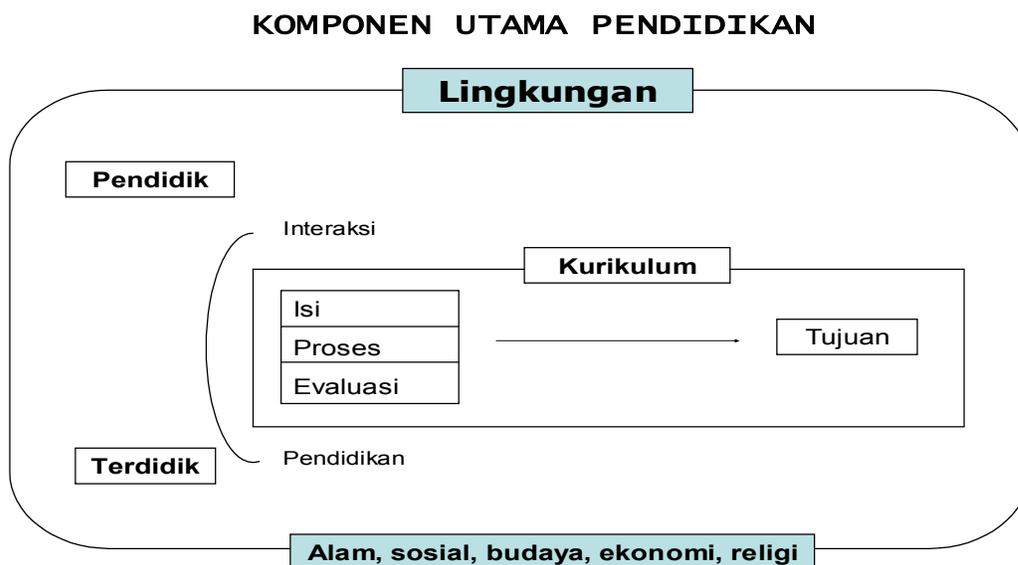
Desain Kurikulum Berbasis Budaya

1. Pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan

Penggunaan pendekatan budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak jaman Aristoteles (Djohar, 1999). Dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalir mengalami banyak kegagalan. Dengan pendekatan budaya diharapkan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan warga sekolah.

Pada hakekatnya, pendidikan merupakan proses budaya. Djohar (1999) mengatakan pendidikan sebagai proses budaya bertujuan menyiapkan masyarakat mampu memasuki kehidupan pada zamannya. Peserta didik disosialisasikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam tatanan kehidupan pada zamannya itu. Oleh karena itu, pendidikan berlaku bagi semua orang dan terjadi sepanjang masa.

Apa implikasi atas pernyataan tersebut, terutama dalam konteks pengembangan kurikulumnya? Mengacu pada pandangan bahwa kurikulum merupakan jantungnya kegiatan pendidikan maka semestinya kurikulumnya perlu dikembangkan atas dasar-dasar nilai-nilai luhur bangsa yang telah disepakati dan berkembang di masyarakatnya. Visualisasinya dapat disajikan sebagai berikut.



(Sumber: Nana Syaodih Sukmadinata, 1989)

2. Pengertian desain kurikulum berbasis budaya

Apa yang dimaksud desain kurikulum berbasis budaya? Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan

yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan system evaluasinya. Alaska Native Knowledge Network (2004) menyatakan;

..... scope and sequence of the curriculum will be extended to include the interaction between content, process and context, and thus go beyond the usual culture-bound determinations that are associated with an emphasis on content alone.

Ciri-ciri kurikulum berbasis budaya: *pertama*, berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat; *kedua*, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber; *ketiga*, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik; *keempat*, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil.

Kurikulum berbasis budaya dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk inovasi kurikulum yang ingin mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban, dan martabat. Kurikulum perlu dikaitkan dengan tatanan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Banyaknya materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya, namun, yang lebih penting adalah “bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang mampu membuka pengekangan-pengekangan yang menghalangi perkembangan potensi peserta didik” (Tilaar, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya, kurikulum berbasis budaya dipandang relevan diterapkan dalam sisdiknas kita. Ditinjau dari sisi filosofi, kurikulum berbasis budaya sesuai dengan hakekat proses pendidikan yang memanusiaan peserta didik. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik. Dari sisi sosiologi, kurikulum berbasis budaya, sesungguhnya, merupakan suatu desain kurikulum yang menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Lulusan suatu jenjang pendidikan diharapkan tidak terasing dengan lingkungannya. Sedangkan ditinjau dari sisi psikologis, kurikulum berbasis budaya mengutamakan pengembangan potensi peserta didik yang manusiawi.

3. Pola pengembangan

Seperti model atau desain kurikulum pada umumnya, kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya, supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Murray Print (1993) mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan “... *the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to produce desired changes in learners*”. Dengan demikian, tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum berbasis budaya meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan *silabus* yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oliva (1992) menyatakan bahwa “*a syllabus is an outline of topics to be covered in a single course or grade level*”. Di sini, yang perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercakup di dalam silabus tersebut, yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Prinsip-prinsip yang dipakai untuk mengembangkan silabus tak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya. Hal ini dikarenakan silabus merupakan salah satu produk kurikulum. Beberapa prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus, antara lain; relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.

Selanjutnya, apabila disepakati bahwa silabus merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, tentu membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek yang dikembangkan. Artinya, aspek-aspek yang ada dalam silabus haruslah merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum.

Beberapa aspek pokok yang perlu ada dalam silabus sebagaimana aspek-aspek yang tercakup dalam kurikulum berbasis budaya, adalah rumusan kompetensi, hasil belajar, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber bahan. Yang penting bahwa dalam penyusunan silabus perlu

memperhatikan aspek-aspek; keterbacaan, keterkaitan antar komponen, dan kepraktisan penggunaannya (Puskur Balitbang Depdiknas, 2002).

b. Implementasi

Beauchamp (1975: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*a process of putting the curriculum to work*". Fullan (Miller dan Seller, 1985: 246) mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*". Berdasarkan atas dua pendapat tersebut, sesungguhnya, implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran atau proses belajar mengajar.

Dengan pengertian yang demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan (2000: 1) mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis". Bisa jadi, dua orang dosen yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misal, kurikulum mata kuliah Sosiologi Pendidikan) akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan dosen.

Begitu urgennya posisi implementasi bagi terwujud atau tidaknya sebuah kurikulum, sangatlah tepat manakala persoalan implementasi kurikulum merupakan persoalan esensial di kalangan pengembang dan pelaksana kurikulum. Terlebih lagi jika sistem persekolahan yang ada lebih menekankan dimensi proses daripada hasil belajar. Oleh karena itu, agar implementasi kurikulum dapat terwujud sesuai dengan kurikulum

sebagai rencana tertulis, disarankan Hasan (2000: 1) agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan.

Bagaimana implementasinya dengan desain kurikulum yang sedang berjalan? Apabila kita sepakat bahwa desain kurikulum berbasis budaya sebagai alternatifnya, hal ini bukan berarti bahwa desain kurikulum yang ada dianggap tidak berlaku sama sekali. Di sini, diperlukan adanya berbagai modifikasi atas berbagai komponen kurikulum, terutama yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Pola pengembangannya bersifat *integrated*.

Dua pola penerapan desain kurikulum berbasis budaya. *Pertama*, mengembangkan desain kurikulum (silabus atau rancangan pelaksanaan pembelajaran) dengan berwawasan budaya. Artinya, aspek-aspek kurikulum yang terkait dalam desain kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada wawasan budaya bangsa, misalnya; pengembangan materi pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Konsekuensinya, dalam implementasinya tentu menggunakan model-model pembelajaran berbasis budaya.

Kedua, menggunakan desain kurikulum berbasis budaya dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Di sini, yang perlu ditekankan adalah penggunaan model-model pembelajaran berbasis budaya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Model-model pembelajaran berbasis budaya yang bisa digunakan adalah model pembelajaran pemecahan masalah, model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran kontekstual, dan lain-lain.

c. **Evaluasi**

Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum (Tyler, 1949). Dengan demikian, jika pihak sekolah menerapkan kurikulum berbasis budaya maka sistem evaluasinya pun akan berubah menyesuaikan dengan desain kurikulumnya.

Evaluasi kurikulum berbasis budaya, sebagaimana yang berlaku pada desain kurikulum lainnya bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan (*feasibility*) kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangan, implementasi, maupun hasil. Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan.

Sasaran kegiatan evaluasi kurikulum berbasis budaya, sesuai dengan tujuannya, meliputi; evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. Demikian pula, evaluasi kurikulum dapat bersifat formatif maupun sumatif.

Evaluasi terhadap rancangan kurikulum ingin melihat kualitas substansi dan format rancangan. Evaluasi terhadap substansi rancangan kurikulum menitik beratkan pada aspek-aspek esensial rancangan kurikulum dan keterkaitannya di antara aspek-aspek esensial tersebut. Evaluasi terhadap format rancangan lebih menekankan pada kecukupan dan fleksibilitas penggunaan format dari rancangan kurikulum.

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum berbasis budaya bertujuan untuk mengetahui kualitas proses implementasi kurikulum (kegiatan pembelajaran) di sekolah (kelas dan luar kelas). Fokus evaluasi diarahkan pada langkah-langkah pembelajaran dan dinamika interaksi pendidik dengan peserta didik.

Evaluasi terhadap hasil belajar menekankan pada kualitas penguasaan peserta didik atas sejumlah pengalaman belajar yang terkandung dalam rumusan kompetensi. Dengan demikian, model evaluasi performansi diasumsikan relevan digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik yang mengikuti desain kurikulum berbasis budaya. Hal ini disebabkan kurikulum berbasis budaya mensyaratkan peserta didik mampu mendemonstrasikan aplikasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pengalaman belajar pada rumusan kompetensi setiap mata pelajaran.

Apa yang dimaksud dengan evaluasi performansi itu? Blank (1982) mengatakan, *“Essentially, a performance test does just what the term implies-it is an instrumen to help the instructor judge whether or not the student can actually perform the task in a job-like setting to some minimum level of acceptability”*. Secara khusus, Mehrens W.A dan Lehmann. I.J (Sudarsono, 2000) mengatakan *“a performance assessment is a procedure*

in which you use work assignments or tasks to obtain information about how well student has learned". Evaluasi performansi merupakan bentuk evaluasi yang bermaksud memberi pertimbangan mengenai nilai dan arti dari apa-apa yang telah dipelajari peserta didik.

Evaluasi performansi didasarkan atas keyakinan bahwa peserta didik mampu mendemonstrasikan terhadap apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya (*know and able to do*) dalam berbagai cara. Evaluasi performansi bertujuan menilai efektivitas penerapan pengetahuan dan ketrampilan pada setting lapangan. Benner (Sudarsono, 2000) mengatakan evaluasi performansi berorientasi pada *skill outcome*. Artinya, ketrampilan menggunakan proses dan prosedur yang merupakan hasil pembelajaran yang diharapkan dalam berbagai bidang akademik. Misalnya, sains menaruh perhatian terhadap ketrampilan laborator, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya berkepentingan dengan ketrampilan berkomunikasi, matematika berkaitan dengan ketrampilan pemecahan masalah, dan lain-lain.

Meskipun demikian, evaluasi performansi seringkali diabaikan dalam penilaian hasil pembelajaran (*outcomes instructional*) karena dua alasan. *Pertama*, evaluasi performansi lebih sulit dalam implementasinya daripada evaluasi hasil belajar pengetahuan, terutama dalam persiapan, administrasi, dan skoring. *Kedua*, penggunaan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) untuk mengetahui taraf pencapaian tujuan pembelajaran seringkali diyakini mampu menilai performansi pengalaman belajar peserta didik, sehingga tanpa menggunakan evaluasi performansi pun seperangkat kompetensi yang dikuasai peserta didik dapat diketahui.

Bagaimana cara mengembangkan alat evaluasi performansi peserta didik? Gronlund (1982) mengajukan empat langkah pengembangan, yaitu menentukan perolehan performansi (*performance outcomes*) yang akan dinilai, menentukan standar pencapaian performansi, membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat pedoman observasi untuk mengevaluasi performansi. Blank (1982) mengajukan tujuh langkah, yaitu menetapkan terhadap aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasi, menetapkan apakah proses dan hasil pembelajaran yang merupakan prioritas evaluasi, mengembangkan butir-butir soal, menetapkan butir-butir soal secara khusus yang menjadi *kata kunci* dari aspek-

aspek yang dinilai, menetapkan standar minimal tingkat penguasaan kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat naskah evaluasi dan mengujicobakannya.

Contoh evaluasi hasil belajar dalam mata pelajaran matematika di sekolah dasar dengan kompetensi peserta didik mampu melakukan pembagian bilangan di bawah sepuluh. Secara substansi, materi diorganisir untuk kepentingan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembagian bilangan. Dalam konteks kurikulum berbasis budaya, materi tersebut juga diarahkan pada penguatan aspek kejujuran.

Kegiatan evaluasi hasil belajar yang dilakukan, yaitu menetapkan kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam melakukan pembagian bilangan dan perilaku kejujuran. Langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator-indikator dari kompetensi mampu membagi bilangan dan kejujuran. Indikator-indikator tersebut menjadi bahan untuk menetapkan butir-butir pertanyaan (soal) guna menilai kompetensi peserta didik.

Untuk menilai kompetensi dalam membagi bilangan dan kejujuran, peserta didik diminta mengerjakan soal-soal tentang pembagian bilangan dan melakukan pengamatan perilaku kejujuran peserta didik sehari-hari. Di sini, yang ingin dilihat adalah realisasi konsep pembagian dengan kejujuran yang dilakukan peserta didik sehari-hari. Selanjutnya, hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pembagian bilangan dan pengamatan guru terhadap perilaku kejujuran peserta didik digunakan untuk menetapkan nilai akhirnya.

Penutup

Desain kurikulum berbasis budaya dapat dijadikan desain kurikulum alternatif untuk pembangunan watak, peradaban, dan martabat bangsa. Dengan desain kurikulum berbasis budaya diharapkan lulusan memiliki wawasan pengetahuan luas, tetapi tetap berwatak, bermartabat dan beradab sesuai nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Pola pelaksanaannya dapat terjadi sejak pengembangan silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Demikian pula, dapat terjadi dalam implementasi kurikulum sedang berjalan (kurikulum yang berlaku).

Kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang relevan diterapkan di sekolah dalam rangka menyiapkan bangsa yang berwatak, beradab, dan bermartabat. Di sini, desain kurikulum berbasis budaya dapat dikatakan sebagai sebuah tuntutan yang harus direalisasikan oleh pihak penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai suatu bentuk kegagalan perubahan.

Selanjutnya, agar kurikulum berbasis budaya dapat optimal maka perlu didesain, diimplementasikan, dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh kurikulum berbasis budaya. Misalnya, kegiatan pembelajaran berbasis pada *student centered*, pembelajaran bersifat pembiasaan, materi diorganisir dalam tematik, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Assembly of Alaska Native Educators. 2003. "Guidelines for cross-cultural Orientation programs". Diambil dari www.ankn.uaf.edu/standards/xcop.html tanggal 2 Agustus 2004.
- Beauchamp, G. (1975). *Curriculum theory*. Willmette, Illionis: The Kagg Press.
- Blank, W.E. (1982). *Handbook for developing competency-based training programs*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Denny Setiawan. 2011. Pendidikan karakter dan implementasinya pada pendidikan anak usia dini". Diambil dari <http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/TIG302.pdf>, tanggal 27 Maret 2011.
- Djohar. 1999. *Reformasi dan masa depan pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang Ekowarni. 2010. "Pengembangan nilai-nilai luhur budi pekerti sebagai karakter bangsa". Diambil dari <http://belanegarari.wordpress.com/2009/08/25/pengembangan-nilai-nilai-luhur-budi-pekerti-sebagai-karakter-bangsa>, Pada tanggal tanggal 26 Maret 2010
- Forrest W Parkay, Eric J. Anctil, and Glen Hass,. 2010. *Curriculum leadership; readings for developing quality educational program. Ninth edition*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gronlund, NE. (1982). *Constructing achievement test: third edition*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Hadisaputra. 2009. "Revitalisasi karakter bangsa". *Tribun Timur*, 18 Juni 2009
- Hasan, Said Hamid. (2000). "Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat". Makalah seminar nasional pengembangan program pendidikan berbasis kewilayahan menyongsong diterapkannya otonomi daerah, 31 Agustus 2000 di UPI Bandung.
- _____. (2002) "Kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan alternatif pemecahannya". Makalah seminar nasional tanggal 11 Mei 2002 di UNY.

- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Longstreet, Wilma S & Shane, Harold G., (1993). *Curriculum for a New Millennium*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Oliva. 1992. *Developing the curriculum*. (Third Edition). United States: HarperCollins Publishers.
- Print, Murray. 1992. *Curriculum development and design (second edition)*. Sidney: Allen & Unwin.
- Puskur. 2001. *Kebijaksanaan umum kurikulum berbasis kompetensi pendidikan dasar dan menengah (Bahan Revisi)*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Saylor J.G. dan kawan-kawan. 1981. *Curriculum planning for better teaching and learning. Fourth Edition*. Japan: Holt, Rinehart and Winston.
- Sudarsono. (2000). "Penyusunan soal tes kinerja (performance-test) sebagai langkah awal pembentukan bank soal". Makalah workshop tentang performance-based evaluation dan bank soal program Meas-lab Due-Like Universitas Negeri Yogyakarta, 28-29 Juli 2000.
- Tilaar. 1999. *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tyler. (1949). *Basic principles of curriculum*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wanda Chrisiana. 2005. "Upaya penerapan pendidikan karakter bagi mahasiswa: studi kasus di jurusan teknik industry UK Petra". Artikel. Jurnal Teknik Industri Vol. 7. No. I. Juni 2005. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

DESAIN KURIKULUM YANG RELEVAN UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER

Anik Ghufron

FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (email: anikghufron@uny.ac.id)

Abstrak

Salah satu persoalan bangsa Indonesia pada saat ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan karakter. Pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan aspek kognitif pada tingkatan rendah. Tolok ukur keberhasilan peserta didik adalah capaian skor prestasi akademik. Kegiatan pembelajaran lebih bersifat *transfer of knowledge* yang memaksakan daripada sebagai wahana persemaian nilai-nilai moral dan etika ke peserta didik.

Kita menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter itu tak mudah, khususnya yang berkaitan dengan organisasi materi. Apakah organisasi materi pendidikan karakter itu bersifat terpisah (*separate subject curriculum*) atau terpadu (*integrated curriculum*) dengan materi mata pelajaran yang tersedia? Oleh karena itu, untuk membantu memecahkan persoalan ini perlu dikembangkan desain kurikulum yang relevan untuk pendidikan karakter.

Keywords: *curriculum design, character education.*